

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI  
DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP  
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
LAMPUNG**

**( Skripsi )**

**Oleh**

**NANDA DWI NOVALIA**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh**

**Nanda Dwi Novalia**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada kabupaten / kota di Provinsi Lampung.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 11 kabupaten / kota di Provinsi Lampung yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2011-2014. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Purposive Sampling*. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan, Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

**Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, Belanja Modal.**

## **ABSTRACT**

### **EFFECT OF ECONOMIC GROWTH, REGIONAL AND REVENUE ALLOCATION FUND GENERAL BUDGET ALLOCATION OF THE CAPITAL DISTRICT GOVERNMENT / CITY IN THE PROVINCE OF LAMPUNG**

*By*

*Nanda Dwi Novalia*

*This study aims to provide empirical evidence about the effect of the Economic Growth, Local Own Revenue (PAD), and the General Allocation Fund (DAU) on the Capital Expenditure districts / cities in Lampung Province.*

*The sample used in this study were 11 districts / cities in Lampung Province taken from the Report of Actual Income and Expenditure Budget (budget) from the years 2011-2014. Methods of data collection used in this study is purposive sampling methods. Analysis tool used in this study is multiple linier regression with a t test, f test, and test the coefficient of determination.*

*The results of this study indicate that partial the General Allocation Fund (DAU) have a significant effect on the Capital Expenditure. Meanwhile, Economic Growth and Local Own Revenue (PAD) had no significant effect on the Capital Expenditure. Simultaneously EconomicGrowth, Local Own Revenue (PAD),and the General Allocation Fund (DAU) significant effect on the Capital Expenditure.*

***Keywords : Economic Growth, Local Own Revenue, General Allocation Fund, Capital Expenditure.***

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN  
BELANJA MODAL PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI  
PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh**

**NANDA DWI NOVALIA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA EKONOMI**

**Pada**

**Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

Judul Skripsi : **PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA  
ALOKASI UMUM TERHADAP  
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA  
MODAL PADA PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : Nanda Dwi Novalia


Nomor Pokok Mahasiswa : 1011031106

Jurusan : Akuntansi


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



  
**Dr. Rindu Rika Gamayuni S.E., M.Si.**  
NIP 197506202000122001

  
**Ninuk Dewi K, S.E., M.Sc., Akt.**  
NIP 198202202008122003

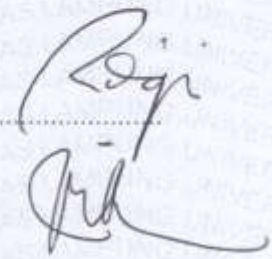
2. Ketua Jurusan Akuntansi

  
**Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt**  
NIP 197108021995122001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E. M.Si**



**Sekretaris : Ninuk Dewi K, S.E., M.Sc., Akt**



**Penguji Utama : Dr. Fajar Gustiawaty D, S.E., M.Si., Akt**

**2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.**  
NIP. 19610904 198703 1 001



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 April 2016**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanda Dwi Novalia

NPM : 1011031106

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Bandar Lampung, April 2016



Nanda Dwi Novalia  
NPM 1011031106

## RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Nanda Dwi Novalia, dilahirkan di Menggala, pada tanggal 29 November 1992, sebagai anak kedua dari lima bersaudara, pasangan Bapak Natori, S.E dan Ibu Herdalina, S.pd. Pada tahun 1998, penulis menyelesaikan pendidikan taman Kanak-kanak (TK) di TK Al-Hidayyah, Menggala. Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di selesaikan pada tahun 2004 di SD 3 Perumnas Way Kandis, Bandar Lampung. Tahun 2007 penulis berhasil menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di SMP N 19 Bandar Lampung dan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) diselesaikan pada tahun 2010 di SMA N 5 Bandar Lampung. Selanjutnya penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Lampung melalui jalur Ujian Mandiri Lokal (UML) pada tahun 2010.



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmatNya.*

*Kupersembahkan hasil karya yang sederhana ini kepada orang-orang luar biasa dalam hidupku Ayahanda Natori, S.E dan Ibunda Herdalina, S.Pd*

*Terima kasih untuk segalanya*

*Terima kasih atas dukungan, kasih sayang dan doa restu yang tanpa hentinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan*

*Adik-adikku tersayang*

*Nissa Tri Rahmadila, Nabil Farizky dan Namira Nayla Nur*

*Terima kasih atas warna dan suka duka kebersamaannya*

*Dan untuk abangku Alm. Ridho Permata Rianda*

*Almamater Tercinta "Universitas Lampung"*

## MOTTO

*Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar*  
(QS. Ali-Imran: 146)

*Happiness is inside you not with another person*  
(John Lennon)

*Be yourself*  
(Nanda Dwi Novalia)

## SANWACANA

Assalamualaikum. Wr. Wb

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

**“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG”**

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan untuk meraih gelar sarjana Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi di Universitas Lampung.

Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan, dan kerjasama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. Selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni S.E., M.Si. Selaku Pembimbing Utama atas kesediaannya memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan yang sangat membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Ninuk Dewi K, S.E., M.Sc., Akt. Selaku Pembimbing kedua atas kesediaannya memberikam bimbingan dan ilmu pengetahuan dan saran serta kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt . Selaku pembahas atas kesediannya memberikan masukan dan saran serta kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Susi Sarumpeat, S.E., M.B.A., Akt. Selaku Pembimbing Akademik Mahasiswa, terima kasih atas kesediaannya dengan sabar memberikan bimbingan.
8. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, terima kasih atas segala ilmu bermanfaat yang telah diberikan.
9. Bapak dan Ibu Staf Administrasi FEB Universitas Lampung yang telah membantu.
10. Yang Tercinta kedua orang tuaku Ayahanda Natori, S.E dan Ibunda Herdalina, S.pd dengan sabar, penuh kasih sayang dan cinta dalam mendidik dan membesarkanku, memberikan segala hal untuk mencukupi kebutuhanku, memberikan dorongan dan semangat bagiku.
11. Yang tercinta Nenekku oma Darmi yang selalu member doa dan nasehat.
12. Yang terkasih kakak ku yang di surga Alm. M. Ridho Permata Rianda
13. Yang terkasih Ketiga adikku, Nissa Tri Rahmadila, Nabil Farizky, dan Namira Nayla Nur telah mendukung dan memberikan semangat tiada henti dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. My lovely Gurlz teman kecil, teman suka maupun duka Yusi Alvita, S.IP, Hapa Septira Poerin, S.E, Indry Kh. Ismi N, S.H, Orinawa Devi Maretta, A.Md dan Tiara Oktaria Putri, S.Kep, ns yang selalu menemani, menghibur dan selalu memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan.

15. Teman-teman kampus tercinta Hana Laila Alviumita, S.E, Bella Chintya Edwin, S.E, Firsty Gustianrana, S.E, Apri Arieska, dan Nevia Oktiana, S.E yang selalu memberi menemani perkuliahan dan dukungan untuk penulis.
16. Teman-teman SMA ku Ni Made Dhyna S, A.Md, Firmansyah Putra, A.Md, Tiara Oktaria Putri, S.Kep, ns, Yunai Septi, S.Kom, Riandy Wibowo, S.H, Andika, Mb Yas , Dewi dan anak-anak MAXIIAT yang selalu memberikan semangat,motivasi dan dukungan untuk penulis.
17. Dolpin ku Devi Tobari, S.Pd, Gladiola Risela Tamara, Yusi Alvita, S.IP yang selalu memberi semangat,motivasi dan dukungan untuk penulis.
18. Kepada sepupu-sepupuku Almira Devita, M. Irvan Rapido, M. Rizky Dani, dan semua sepupu-sepupu tercintaku yang selalu memberi motivasi dan dukungan kepada penulis.
19. Teman-teman seperjuangan mb Cynthia fadila suud, mb Yosianastasia, Febi Saputra, M. Ferly Herdiansyah yang selalu membantu dan member semangat.
20. Seluruh Keluarga Besar yang selalu berdoa dan menanti keberhasilanku.
21. Teman-teman seperjuangan Akuntansi 2010 dan teman-teman KKN.
22. Bapak Sobari, Ibu tina selaku staf administrasi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.
23. Semua pihak yang telah banyak membantu dan mendoakan dalam upaya menyelesaikan penulisan skripsi ini serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi, mohon maaf jika penulis tidak menyebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, dan hidayahNya kepada kita semua, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima Kasih.

Bandar Lampung, April 2016  
Penulis,

**Nanda Dwi Novalia**

## DAFTAR ISI

|                                                        | <b>Halaman</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>ABSTRACT</b> .....                                  | <b>i</b>       |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                   | <b>ii</b>      |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....                       | <b>iii</b>     |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                        | <b>iv</b>      |
| <b>PERNYATAAN</b> .....                                | <b>v</b>       |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b> .....                             | <b>vi</b>      |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                               | <b>vii</b>     |
| <b>MOTO</b> .....                                      | <b>viii</b>    |
| <b>SANWACANA</b> .....                                 | <b>ix</b>      |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                | <b>x</b>       |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                              | <b>xi</b>      |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                           | <b>xii</b>     |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                             | <b>xiii</b>    |
| <br>                                                   |                |
| <b>I. PENDAHULUAN</b>                                  |                |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                       | 1              |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                              | 6              |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                | 6              |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian .....                          | 6              |
| 1.3.2 Manfaat Penelitian .....                         | 7              |
| <br>                                                   |                |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS</b> |                |
| 2.1 Teori Keagenan .....                               | 9              |
| 2.2 Pertumbuhan Ekonomi .....                          | 10             |
| 2.3 Alokasi Anggaran Belanja Daerah .....              | 12             |
| 2.4 Pendapatan Asli Daerah.....                        | 14             |
| 2.5 Dana Alokasi Umum .....                            | 16             |
| 2.6 Belanja Modal .....                                | 17             |
| 2.7 Penelitian Terdahulu.....                          | 22             |

|       |                                                                                |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.8   | Kerangka Pemikiran .....                                                       | 25 |
| 2.8.1 | Pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengalokasian Belanja Modal.....    | 25 |
| 2.8.2 | Pengaruh antara pendapatan Asli Daerah dengan Pengalokasian Belanja Modal..... | 25 |
| 2.8.3 | Pengaruh antara Dana Alokasi Umum dengan Pengalokasian Belanja Modal.....      | 26 |
| 2.9   | Hipotesis Penelitian .....                                                     | 27 |
| 2.9.1 | Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Alokasi Belanja Modal.....               | 27 |
| 2.9.2 | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal.....            | 29 |
| 2.9.3 | Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal.....                 | 30 |

### **III. METODE PENELITIAN**

|         |                                                    |    |
|---------|----------------------------------------------------|----|
| 3.1     | Objek Penelitian .....                             | 33 |
| 3.2     | Populasi dan Sampel Penelitian .....               | 33 |
| 3.3     | Metode Penelitian .....                            | 35 |
| 3.4     | Metode Pengumpulan Data .....                      | 35 |
| 3.5     | Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ..... | 35 |
| 3.5.1   | Variabel Penelitian .....                          | 35 |
| 3.5.1.1 | Variabel Bebas (Independen).....                   | 36 |
| 3.5.1.2 | Variabel Terikat (Dependen).....                   | 36 |
| 3.5.2   | Definisi Operasional.....                          | 36 |
| 3.6     | Alat Analisis .....                                | 38 |
| 3.6.1   | Analisis Deskriptif.....                           | 39 |
| 3.6.2   | Pengujian Asumsi Klasik .....                      | 39 |
| 3.7     | Analisis Regresi .....                             | 41 |
| 3.8     | Rancangan Pengujian Hipotesis .....                | 42 |
| 3.9     | Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....               | 43 |
| 3.10    | Uji F .....                                        | 43 |
| 3.11    | Uji t .....                                        | 43 |

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 Hasil Penelitian .....                                                | 45 |
| 4.1.1 Analisis Data .....                                                 | 45 |
| 4.1.2 Analisis Deskriptif.....                                            | 47 |
| 4.1.3 Pengujian Asumsi Klasik .....                                       | 48 |
| 4.2 Pengujian Hipotesis .....                                             | 53 |
| 4.2.1 Pengujian Ketepatan Perkiraan Model ( <i>Goodness of Fit Test</i> ) | 54 |
| 4.2.2 Pengujian Secara Simultan .....                                     | 54 |
| 4.2.3 Pengujian Parsial (Uji Statistik t) .....                           | 55 |
| 4.3 Pembahasan .....                                                      | 57 |

#### **V. KESIMPULAN**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan .....             | 64 |
| 5.2 Saran .....                  | 65 |
| 5.3 Keterbatasan Penelitian..... | 65 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

| <b>Tabel</b>                                                                 | <b>Halaman</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....                                      | 24             |
| 3.1 Kriteria Autokorelasi Durbin-Watson.....                                 | 41             |
| 4.1 Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan Belanja Modal Tahun 2011-<br>2014..... | 46             |
| 4.2 Analisis Deskriptif.....                                                 | 47             |
| 4.3 Uji Normalitas.....                                                      | 49             |
| 4.4 Hasil Pengujian Multikolinearitas.....                                   | 51             |
| 4.5 Hasil Uji Durbin Watson.....                                             | 52             |
| 4.6 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi.....                             | 54             |
| 4.7 Pengujian Hipotesis secara Simultan.....                                 | 54             |
| 4.8 Hasil Pengujian Statistik t.....                                         | 55             |
| 4.9 Hasil Penelitian.....                                                    | 57             |

## DAFTAR GAMBAR

| <b>Gambar</b>                                            | <b>Halaman</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1 Kerangka Pemikiran.....                              | 27             |
| 4.1 <i>Normal P-P Plot of Regression Standard</i> .....  | 49             |
| 4.2 <i>Scatterplot</i> untuk uji heterokedastisitas..... | 53             |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Otonomi daerah menghasilkan dampak yang beragam bagi perekonomian daerah juga berpotensi menimbulkan resiko fiskal.

Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU 22/1999 (direvisi menjadi UU 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim, 2001; Halim & Abdullah, 2006). Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implicit merupakan bentuk kontra antara eksekutif, legislatif, dan publik.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, Pemerintah Daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (*value for money*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, APBD yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat layanan yang berorientasi pada kepentingan publik (PP No. 58 Tahun 2005).

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di Indonesia, anggaran daerah biasa disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran yang harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk,2008). Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 dalam Warsito Kawedar, dkk (2008), APBD merupakan rencana keuangan tahun Pemerintah

Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 proses penyusunan anggaran melibatkan pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) dan pihak legislatif (DPRD), dimana kedua pihak tersebut melalui panitia anggaran. Eksekutif berperan sebagai pelaksana operasionalisasi daerah yang berkewajiban membuat rancangan APBD. Sedangkan legislatif bertugas mensahkan rancangan APBD dalam proses ratifikasi anggaran.

Proses penyusunan APBD dimulai dengan kedua belah pihak yaitu antara eksekutif dengan legislatif membuat kesepakatan tentang kebijakan umum APBD yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pihak eksekutif bertugas membuat rancangan APBD yang sesuai kebijakan tersebut, kemudian pihak legislatif menetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) sebelumnya dirapatkan. Dalam teori keagenan, peraturan daerah menjadi alat legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran yang dijalankan oleh pihak eksekutif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintahan daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan

hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya, seperti belanja pegawai, karena terlalu besarnya belanja pegawai yang dinilai dalam APBD hal ini mengakibatkan berkurangnya alokasi untuk belanja modal, yang dipandang lebih mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat (Dirjen Perimbangan Keuangan 2012).

Fenomena yang ada bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi pada Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal sangat kecil, sedangkan pada Dana Alokasi Umum terjadi peningkatan yang besar. Hal ini mengakibatkan tidak ada peranan atas Pendapatan Asli Daerah terhadap kegiatan daerah yang mana seharusnya PAD menjadi sumber utama untuk membiayai kegiatan daerah, sehingga DAU menjadi sumber utama untuk membiayai kegiatan daerah.

Pemerintahan daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah asset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapatan tersebut, Stine (1994) dalam

Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Hasil penelitian Nugroho Suratno Putro (2009) tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (study kasus pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah), hasil pengujian menunjukkan bahwa hanya Dana Alokasi Umum yang berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Kemampuan keuangan setiap daerah tidak sama dalam mendanai berbagai macam kegiatannya, hal tersebut menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi kesenjangan fiskal ini, Pemerintah mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana perimbangan dari pemerintah yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat ini diharapkan Pemerintah Daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai

belanja modal di daerahnya. Namun, pada praktiknya, transfer dana yang bersumber dari APBN merupakan sumber pendanaan utama Pemerintahan Daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membuat satu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas makaperumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal?
2. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal?
3. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :



1. Untuk memberikan bukti empiris pada Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap alokasi Anggaran Belanja Modal.
2. Untuk memberikan bukti empiris pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap alokasi Anggaran Belanja Modal.
3. Untuk memberikan bukti empiris pada Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap alokasi Anggaran Belanja Modal.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi penulis, sebagai pembelajaran awal dalam melakukan penelitian, juga menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi serta hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah beserta pengelolaan keuangan daerah, dan kaitannya dengan pembangunan daerah otonom sesuai dengan tujuan awal konsep desentralisasi dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi pada program studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.
2. Bagi pemerintah pusat, diharapkan penelitian ini memberikan masukan mengenai pengembangan atas peningkatan PAD, sehingga di masa mendatang daerah otonom dapat mengembangkan dan membangun daerahnya dengan sumber pendanaan dan hasil kekayaan di daerahnya. Diharapkan konsep desentralisasi sesungguhnya dapat terwujud secepatnya. Pemerintah daerah tidak menggantungkan diri kepada pemerintahan pusat terus menerus paling tidak dapat di minimalisirkan sehingga semakin mandiri.

3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, bahan rujukan dan referensi bagi pengembangan dan pengkajian konsep tentang bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU dan PAD terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Penelitian ini juga bermanfaat untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat lanjutan, melengkapi, maupun menyempurnakan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Keagenan**

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jasen dan Meckling, 1976). Dalam teori keagenan terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga mungkin saja pihak agen tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan prinsipal. Scott (2000) dalam Bangun (2009) menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan cabang dari *game theory* yang mempelajari suatu model kontraktual yang mendorong agen untuk bertindak bagi prinsipal saat kepentingan agen bisa saja bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Prinsipal pendelegasikan pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan kepada agen, dimana wewenang dan tanggung jawab agen maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.

Dalam kenyataannya, wewenang yang diberikan prinsipal kepada agen sering mendatangkan masalah karena tujuan prinsipal berbenturan dengan tujuan pribadi agen. Dengan kewenangan yang dimiliki, manajemen bisa bertindak dengan

hanya menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan kepentingan prinsipal. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh keduanya, sehingga menimbulkan adanya asimetri informasi (*asymmetric information*). Mursalim (2005) dalam Bangun (2009) menyatakan bahwa informasi yang lebih banyak dimiliki oleh agen dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan *utility*-nya. Sedangkan bagi prinsipal akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada.

## **2.2 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi, yang berarti perluasan kegiatan ekonomi, adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru (Boediono, 2010:28). Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan pertumbuhan perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita (Boediono, 1985). Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi meningkat dari satu periode berikutnya, berarti berarti jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada periode berikutnya yang berarti bahwa produktivitas dari faktor-faktor yang dimasukkan dalam produksi menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengan kenyataan adanya penambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhannya akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai, maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman, yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi yang sering diukur dengan menggunakan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB/PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Penyajian angka-angka dalam PDRB dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas

dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dengan kenaikan output (Produksi Domestik Bruto) dan pendapatan riil per kapita memang bukanlah satu-satunya sasaran di Negara-negara berkembang, namun kebijakan ekonomi dalam meningkatkan pertumbuhan output perlu dilakukan karena merupakan syarat penting untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan untuk mendukung tujuan kebijakan pembangunan lainnya.

### **2.3 Alokasi Anggaran Belanja Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Belanja daerah adalah kewajiban Pemerintahan daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Selanjutnya, dalam operasionalisasinya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2009, belanja daerah merupakan bagian dari pengeluaran daerah, disamping pengeluaran pembiayaan daerah yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan agar pemerintahan daerah berupaya menetapkan target capaian baik dalam konteks daerah, satuan kerja dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Dalam hal ini, belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Klasifikasi Belanja daerah berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua yaitu Belanja Operasional dan Belanja Modal. Belanja Operasi merupakan belanja yang memberikan manfaat atau akan terpakai habis dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan selama tahun berjalan. Sedangkan Belanja Modal adalah belanja yang memberikan manfaat lebih dari 1 tahun dan nilainya material. Penentuan tingkat materialitas belanja perlu dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Berikut jenis-jenis belanja diantaranya:

1. Belanja Operasional, terdiri dari:
  - 1) Belanja Pegawai
  - 2) Belanja Barang
  - 3) Belanja Bunga
  - 4) Belanja Subsidi
  - 5) Belanja Hibah
  - 6) Belanja Bantuan Sosial
  - 7) Belanja Bantuan Keuangan
2. Belanja Modal, terdiri dari:
  - 1) Belanja Tanah
  - 2) Belanja Peralatan dan Mesin
  - 3) Belanja Gedung dan Bangunan
  - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
  - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya
3. Belanja Tak Terduga

## 2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2004 : 67) pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 6

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

### 1. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pajak tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Jenis-jenis pajak daerah adalah:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran dan Rumah Makan
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan



- 6) Pajak Badan Galian Golongan C
- 7) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Pemukiman

## 2. Retribusi Daerah

Sumber pendapatan lain yang dapat dikategorikan dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan. Yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 3) Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

### 3. Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Salah satu penyebab diberlakukannya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda pemerintahan daerah. Termasuk didalamnya adalah pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sektor industry. Dengan adanya otonomi daerah maka inilah saatnya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Undang-undang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD ini bersama sektor swasta atau Asosiasi Pengusaha Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi daerah sehingga dapat menunjang kemandirian daerah dalam pembangunan perekonomian daerah.

### 4. Lain-lain Pendapatan yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintahan pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan juga bisa dengan menerbitkan obligasi daerah.

## 2.5 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (UU 32/2004). Salah satu dana

perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana hibah (*grants*) yang kewenangan pengguna diserahkan penuh kepada Pemda penerima.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pengertian dana alokasi umum yaitu: “Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dengan pertimbangan tersebut, khususnya DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

## **2.6 Belanja Modal**

Menurut Halim (2007:101) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintahan daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Belanja modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama:

### 1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, baik nama dan sewa tanah, pengasongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat,

dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam

kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk meseum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Berbagai belanja yang dialokasikan pemerintah, hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Untuk itu, untuk kepentingan jangka pendek, pungutan yang bersifat retribusi lebih relevan dibanding pajak. Alasan yang mendasari, pungutan ini berhubungan langsung dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak meningkat.

Secara spesifik sumber pendanaan untuk Belanja Modal belum ditentukan aturannya. Namun seluruh jenis sumber-sumber penerimaan daerah dapat dialokasikan untuk mendanai Belanja Daerah diantaranya Belanja Modal.

Sumber-sumber penerimaan daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004) yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan Belanja Daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan yaitu: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
3. Lain-Lain pendapatan yang sah yaitu: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Sedangkan Pembiayaan daerah bersumber dari: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana cadangan daerah, dan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengalokasi dana yang bersumber dari pendapatan dan pembiayaan daerah kepada belanja daerah ditentukan oleh kebutuhan daerah sendiri atas kebutuhan belanja daerahnya. Pada umumnya sumber dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah lebih banyak dialokasikan kepada belanja operasional daerah dan sisanya dialokasikan untuk belanja daerah lainnya diantaranya belanja modal. DAU lebih banyak dialokasikan kepada belanja pegawai, dan sisanya dialokasikan kepada belanja-belanja daerah diantaranya Belanja Modal. Abdullah (2008) juga menjelaskan bahwa belanja modal pada umumnya berasal dari dana bantuan (*fund*). Dana bantuan pemerintah yang selalu dialokasikan untuk membiayai Belanja Modal adalah Dana Alokasi Khusus. Secara keseluruhan jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya 29 persen dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014. Namun Bank Indonesia dalam *Bisnis.com* (02/03/2013) mencatat bahwa alokasi Belanja Modal di hampir seluruh daerah terhadap total anggaran secara umum masih rendah. Pangsa Belanja Modal terhadap APBD di Luar Jawa memang lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa, sejalan dengan luasnya ruang kebutuhan pengembangan infrastruktur.

Berdasarkan teori di atas peneliti mencoba menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya alokasi Belanja Modal Pemda dalam APBD yaitu:

1. Kelemahan perencanaan belanja pemerintah daerah.

Proporsia lokasi belanja daerah masih didominasi kepentingan operasional

rutin pemerintahan seperti belanja barang dan belanja pegawai dibandingkan dengan lokasi belanja untuk kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan publik. Hal ini tentunya mempengaruhi besarnya anggaran Belanja Modal Pemda.

2. Ketersediaan sumber-sumber dana belanja daerah.

Pendapatan Daerah dan Pembiayaan merupakan sumber-sumber dana belanja daerah. Apabila PAD terbatas untuk membiayai belanja daerah maka diperlukan adanya bantuan dana transfer (DAU, DBH, DAK) dari pemerintah pusat untuk membantu pendanaan belanja daerah dan menggunakan dana Pembiayaan (SiLPA, Pinjaman) bila terjadi defisi anggaran. Apabila tidak tersedia sumber-sumber dana belanja daerah yang cukup maka sangat riskan untuk bisa menyediakan anggaran yang besar khususnya untuk Belanja Modal.

3. Luas nya daerah yang perlu dikembangkan dan dibangun. Daerah yang padat pembangunan tentunya tidak membutuhkan alokasi Belanja Modal yang banyak. Pengalokasian dana pemeliharaanlah yang perlu ditingkatkan. Namun bagi daerah yang baru dimekarkan tentunya membutuhkan alokasi dana yang sangat besar pada Belanja Modalnya. Daerah pemekaran membutuhkan banyak pembenahan, pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana publik yang memadai dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga daerah tersebut memiliki daya saing yang kuat dengan daerah lainnya.

Straub (2008) menjelaskan bahwa teori pertumbuhan modern menekankan kemungkinan peran belanja modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitiannya efek langsung peningkatan Belanja modal adalah dapat secara langsung mempengaruhi produktivitas faktor-faktor lain yang dapat merangsang peningkatan output ekonomi. Dan secara tidak langsung terkait dengan eksternalitas. Dengan adanya infrastruktur yang berkualitas maka dapat mengurangi biaya ketergantungan terhadap sektor swasta seperti penyediaan air bersih, listrik maupun jalan sesuai dengan hasil penelitian Agenor dan Moreno (2006). Pengeluaran biaya daerah kesektor swasta juga dapat dikurangi melalui peningkatan modal manusia dan produktivitas tenaga kerja sebagai hasil atas investasi publik (Galianiet al., 2005).

## **2.7 Penelitian Terdahulu**

Darwanto dan Yustikasari (2007) meneliti tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sampel yang digunakan yaitu Kabupaten / Kota di Jawa dan Bali Tahun 2004-2005 dengan alasan ketersediaan data. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sedangkan variabel PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Ivana (2009) meneliti tentang Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. Sampel yang digunakan yaitu Kabupaten / Kota di Propinsi Lampung



Tahun 2002-2006. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa hanya Dana Alokasi Umum yang berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal dapat diterima, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal ditolak, jadi Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Arwati dan Hadiati (2013) meneliti tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sampel yang digunakan yaitu Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2008-2010. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal

Penelitian yang dilakukan oleh Sularno (2013) tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sampel yang digunakan yaitu Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2007-2011. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa variabel independen tersebut (variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum) berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

Penelitian terdahulu di atas kemudian diringkas dalam Tabel 2.1 berikut

ini :

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan penelitian terdahulu**

| <b>Peneliti (tahun)</b>               | <b>Variabel yang Digunakan</b>                                                                                                                  | <b>Hasil Penelitian</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) | Variabel dependen :<br>belanja modal<br><br>Variabel independen :<br>pertumbuhan ekonomi,<br>PAD, DAU                                           | Variabel PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal                                                                                                                  |
| Yonia Ivana (2009)                    | Variabel dependen :<br>belanja modal<br><br>Variabel independen :<br>Dana alokasi umum,<br>pendapatan asli daerah<br>dan pertumbuhan<br>ekonomi | Variabel DAU berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal dapat diterima, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal ditolak, jadi Pertumbuhan Ekonomi dan PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal |
| Dini Arwati dan Novita Hadiati (2013) | Variabel dependen :<br>belanja modal<br><br>Variabel independen :<br>pertumbuhan ekonomi,<br>PAD, DAU                                           | Variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan PAD, dan DAU berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal.                                                                                                  |
| Fitria Megawati Sularno (2013)        | Variabel dependen :<br>belanja modal<br><br>Variabel independen :<br>pertumbuhan ekonomi,<br>PAD, DAU                                           | Variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan PAD, dan DAU berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal.                                                                                                  |

## **2.8 Kerangka Pemikiran**

### **2.8.1 Pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengalokasian Belanja Modal**

Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik (*public service*) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal. Karena pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung dengan infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan sarana dan prasarana tersebut didapatkan dari pengalokasian anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD. Dengan demikian, ada pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dengan pengalokasian belanja modal. Biasanya bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi belanja modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat tahun anggaran.

### **2.8.2 Pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pengalokasian Belanja Modal**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal. PAD didapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik (*public*

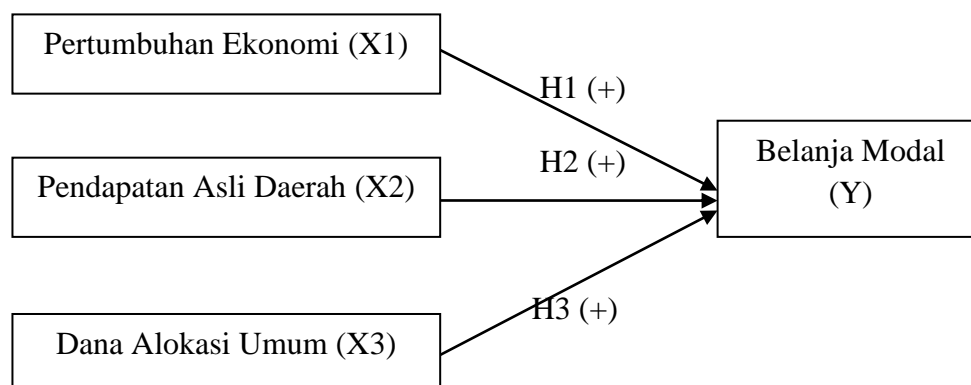
*service*) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal, karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah. Bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di daerahnya. Pengadaan infrastruktur atau sarana prasarana tersebut dibiayai dari alokasi anggaran belanja modal dalam APBD tiap tahunnya. Dengan demikian, ada pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengalokasian belanja modal. Tetapi tidak semua daerah yang berpendapatan tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula.

### **2.8.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum dengan Alokasi Belanja Daerah**

Hampir sama dengan PAD, DAU merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk belanja modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintahan daerah (agen) kepada masyarakat (prinsipal). Bedanya PAD berasal dari uang masyarakat, sedangkan DAU berasal dari transfer APBN oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Pada penelitian ini menggunakan tahun yang berbeda yaitu tahun realisasi untuk variabel x dan tahun berikutnya tahun anggaran untuk variabel y.

Kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap anggaran belanja modal adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.9 Hipotesis Penelitian

### 2.9.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Alokasi Belanja Modal

Kebijakan otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus tiap-tiap daerah. Hal ini mendorong pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Tetapi, kemudian daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam mengelola potensi lokasinya dan ketersediaan sarana prasarana serta sumber daya sangat berbeda. Perbedaan ini dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya (Nugroho, 2010).

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto. Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut penelitian Lin dan Liu (2000) bahwa upaya desentralisasi memberikan pengaruh yang sangat berarti terhadap

pertumbuhan ekonomi daerah. Oates (1995) dalam Lin dan Liu (2000) membuktikan bahwa antara desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Darwanto (2007) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan. Faktor-faktor tersebut antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintahan dan dukungan pembangunan.

Berdasarkan landasan teori dan argumen di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan otonomi daerah mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah berbeda-beda sesuai dengan potensi tiap-tiap daerah. Sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya investasi modal swasta maupun pemerintahan. Hal inilah yang mengakibatkan pemerintah lebih leluasa dalam menyusun anggaran belanja modal. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) meneliti tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sampel yang digunakan yaitu Kabupaten / Kota di Jawa dan Bali Tahun 2004-2005 dengan alasan ketersediaan data. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arwati dan Hadiati (2013) meneliti tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian

Anggaran Belanja Modal. Sampel yang digunakan yaitu Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2008-2010. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa variabel independen tersebut (variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum) berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Sedangkan penelitian Nugroho (2009) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal, karena peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah belum tentu diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal, tergantung pada situasi dan kondisi tiap-tiap daerah. Dalam penelitian tersebut menggunakan data realisasi dan untuk variabel anggaran belanja modal tahun berikutnya menggunakan tahun anggaran. Oleh karena itu, untuk hipotesis pertama dinyatakan sebagai berikut:

**H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.**

### **2.9.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal**

Pemerintah daerah di dalam membiayai belanja daerahnya, selain dengan menggunakan transfer dari pemerintahan pusat yaitu Dana Alokasi Umum, Pemerintahan Daerah juga menggunakan sumber dananya sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah. Dalam literature ekonomi dan keuangan daerah, hubungan pendapatan dan belanja daerah didiskusikan secara luas sejak akhir decade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan tersebut diuji secara empiris (Chang & Hang Ho, 2002 dalam Purnomo 2006). Sebagian studi menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja, sebagian lainnya menyatakan bahwa belanjalah yang mempengaruhi pendapatan (Abdul Aziz, 2000

dalam Purnomo 2006). Namun, untuk kasus di Pemda di Indonesia, kecenderungan yang terjadi selama ini adalah Pendapatan mempengaruhi Belanja. Hal ini bisa dilihat dari kebiasaan di daerah dimana menunggu kepastian DAU dulu baru menentukan alokasi belanja dalam APBD (Abdullah 2007).

Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran. Hal ini juga berlaku pada perubahan Pendapatan Asli yang akan berpengaruh terhadap belanja daerah, khususnya belanja Modal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja daerah. Sehingga semakin tinggi jumlah Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula tingkat belanja daerah tersebut. Dalam penelitian tersebut menggunakan data realisasi dan untuk variabel anggaran belanja modal tahun berikutnya menggunakan tahun anggaran. Pada beberapa penelitian sebelumnya hasil PAD selalu positif signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan landasan teoretis dan temuan-temuan empiris di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

**H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.**

### **2.9.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal**

Untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diterbitkan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah didalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi,



dan pembantuan. Adapun sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. Adapun cara menghitung dana alokasi umum menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- d. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pemerintahan pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintahan daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dengan adanya transfer DAU dari Pemerintahan Pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintahan yaitu meningkatkan pelayanan publik.

Beberapa penelitian sebelumnya juga yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan hasil DAU berpositif signifikan terhadap belanja modal. Dalam penelitian tersebut menggunakan data realisasi dan untuk variabel anggaran belanja modal tahun berikutnya menggunakan tahun anggaran. Landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas, menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

**H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum sebagai variabel independen dan Belanja Modal sebagai variabel dependen. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

#### **3.2 Populasi dan Sampel Penelitian**

Menurut Sekaran (2006:121), Populasi (*population*) adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintahan Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung berjumlah 15 kabupaten dan kota. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung pada tahun 2012-2014. Data sampel diambil dengan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria yaitu:

1. Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang mempublikasikan laporan keuangannya secara konsisten dari tahun 2012-2014.
2. Kabupaten/Kota yang bukan daerah pemerkararan baru atau berdiri selama lima tahun.

Dari 15 daerah kota dan kabupaten yang dijadikan populasi, hanya sebanyak 11 yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai sampel penelitian. Sumber data dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id). Dari laporan realisasi APBD tahun 2012-2014 dapat diperoleh data mengenai jumlah anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dari populasi yang berjumlah 15 (13 kabupaten dan 2 kota), peneliti hanya meneliti sampel sebanyak 11 (9 kabupaten dan 2 kota) yang sesuai dengan kriteria:

1. Kabupaten Lampung Barat
2. Kabupaten Lampung Selatan
3. Kabupaten Lampung Timur
4. Kabupaten Lampung Tengah
5. Kabupaten Lampung Utara
6. Kabupaten Tanggamus
7. Kabupaten Way Kanan
8. Kabupaten Tulang Bawang
9. Pesawaran
10. Kota Bandar Lampung
11. Kota Metro

### **3.3 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*).

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder bersumber dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui [www.depkeu.djpk.go.id](http://www.depkeu.djpk.go.id). Dari laporan realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah anggaran belanja modal, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diprosikan oleh PDRB dan PAD bersumber dari BPS Lampung melalui [www.bps.go.id/lampung](http://www.bps.go.id/lampung).

### **3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

#### **3.5.1 Variabel Penelitian**

Variabel adalah apa pun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai (Sekaran, 2002). Penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya (Sekaran, 2002 : 30). Pengujian ini untuk menganalisis secara empiris

mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja langsung.

### 3.5.1.1 Variabel Bebas (Independen)

Ghozali (2005) menjelaskan bahwa disebut variabel independen karena variabel ini tidak dipengaruhi oleh variabel *antiseden* (sebelumnya). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

### 3.5.1.2 Variabel Terikat (Dependen)

Ghozali (2005) menjelaskan bahwa disebut variabel dependen karena variabel ini dipengaruhi variabel sebelumnya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal.

## 3.5.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel atau dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Sekaran, 2002).

Variabel Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita (Boediono, 1985). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dalam suatu tahun tertentu. Pertumbuhan Ekonomi diukur dengan rumus :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(PDRBt - PDRBt-1)}{PDRBt-1} \times 100 \%$$

Dimana dalam pengukurannya menggunakan skala rasio.  
(Sumber : UU No. 33 tahun 2004).

Variabel Pendapatan Asli Daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Variabel Pendapatan Asli daerah diukur dengan rumus :

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$$

(Sumber : UU No. 33 tahun 2004).

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Kabupaten / Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD. Rumusan alokasi Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dimana,

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

(Sumber : UU No. 33 tahun 2004).

Variable Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus untuk masing-masing Kabupaten / Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

Variabel dependen yang digunakan adalah belanja modal. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Indikator variabel ini diukur dengan :

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya}$$

(Sumber : UU No. 33 tahun 2004).

### 3.6 Alat Analisis

Analisis yang dilakukan diawali dengan analisis deskriptif sebagai gambaran awal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB), PAD, DAU dan belanja modal. Kemudian dilakukan pengujian asumsi klasik agar asumsi-asumsi yang mendasari model regresi linier dapat terpenuhi dan penelitian tidak menjadi bias. Dari hasil pengujian asumsi klasik dilanjutkan dengan analisis regresi dimana akan diteliti masing-masing hipotesis, analisis regresi yang dipakai adalah regresi berganda.



### 3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis ini menggunakan alat-alat analisis deskriptif seperti rata-rata, nilai minimum, maksimum, standar deviasi. Analisis ini ditunjukkan untuk memberikan gambaran awal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB), PAD, DAU dan belanja modal.

### 3.6.2 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi yang perlu digunakan antara lain: Uji Normalitas, Autokorelasi, Uji Multikolenearitas, dan Uji Hetereskedasitas.

- a. Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal (Nugroho, 2005). Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak dapat dilihat melalui normaprobability plot dengan membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Data normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2005).
- b. Uji Multikolinieritas, diperlukan untuk mengetahui apakah ada tidaknya variable independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model (Nugroho, 2005: 58). Selain itu deteksi terhadap multikolinieritas juga bertujuan untuk menghindari bias dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing

variabel independen terhadap variable dependen. Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas.  $VIF = 1/Tolerance$ , jika  $VIF = 10$ , maka  $Tolerance = 1/10 = 0,1$ .

- c. Uji Heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki kesamaan variance residual suatu periode pengamatan dengan pengamatan yang lain, atau homoskedastisitas. Menurut Ghazali (2005: 107) model regresi yang baik adalah model yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan dengan Uji Glesjer. Asumsi utama Uji Glesjer yaitu dengan melakukan regresi variabel independen terhadap residual (Ghozali, 2005: 111).
- d. Uji Autokorelasi, dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dan dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pengujian asumsi ketiga ini, dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson (*Durbin-Watson Test*), yaitu untuk menguji apakah terjadi korelasi serial atau tidak dengan digunakan untuk menghitung nilai  $d$  statistik. Salah satu pengujian yang mengetahui adanya autokorelasi adalah denganmemakai

uji statistik Durbin-Watson (DW test), dimana hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai Durbin-Watson (Wardani, 2008).

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Autokorelasi Durbin-Watson**

| DW           | Kesimpulan                |
|--------------|---------------------------|
| <1,414       | Ada autokorelasi positif  |
| 1,414 -1,724 | Tanpa kesimpulan          |
| 1,724 -2,276 | Tidak ada autokorelasi    |
| 2,276 -2,586 | Tanpa kesimpulan          |
| >2,586       | Ada autokorelasi negative |

Sumber :Wardani, 2008

### 3.7 Analisis Regresi

Statistik yang digunakan adalah regresi berganda (*multiple regression*) karena analisis regresi dapat digunakan untuk melihat pengaruh pendapatan terhadap pengeluaran pemerintahan (Hoover & Sheffrin, 1992 dalam Purnomo 2006).

Regresi berganda digunakan dengan tujuan untuk memprediksi apakah komponen-komponen pertumbuhan ekonomi , PAD, dan DAU mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah Daerah, dimana persamaannya adalah sebagai berikut, (Gujarati, 1995):

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + e$$

Dimana:

Y = Belanja Modal

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X1 = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

X2 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X3 = Dana Alokasi Umum (DAU)

e = *error*

Pengelolaan data akan dilakukan dengan menggunakan bantuan software *SPSS for windows release 16.0 (Statistical Package for Social Science)*.

### **3.8 Rancangan Pengujian Hipotesis**

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan dari variabel independen (Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum) terhadap variabel dependen (Belanja Modal).

1. Uji Signifikansi Parameter Individual. Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang dilakukan dengan menggunakan Uji-t pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan analisis ( $\alpha$ ) 5%.
2. Uji Statistik F. pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi dapat dan layak digunakan untuk memprediksi Belanja Modal atau dapat dikatakan bahwa semua variabel independen secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis ini dilakukan pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan analisis ( $\alpha$ ) 5%.

Dasar pengambilan keputusan adalah:

- a) Jika Sig < 0.05 maka : Ha diterima.
- b) Jika Sig >0.05 maka : Ha ditolak.

### 3.9 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antarvariabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan determinasi (*adjusted R-square*). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2005). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005).

### 3.10 Uji F

Output hasil uji F dilihat untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung secara simultan (Gujarati, 1999). Pedoman untuk menerima atau menolak hipotesis sebagai berikut :

1. *Probabilities value* ( $p$ )  $> 0,05$  maka  $H_a$  ditolak. Artinya tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.
2. *Probabilities value* ( $p$ )  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima. Artinya ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

### 3.11 Uji t

Uji Statistik t untuk menguji secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan dengan tingkat keyakinan 95% ( $\alpha = 0,05$ ). Output hasil uji t dilihat untuk mengetahui pengaruh

variabel independen secara individu terhadap variabel dependen, dengan menganggap variabel independen lainnya konstan (Gujarati, 1999). Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak yaitu :

1. *Probabilities value*  $(p) > 0,05$  maka  $H_a$  ditolak. Artinya tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.
2. *Probabilities value*  $(p) < 0,05$  maka  $H_a$  diterima. Artinya ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil-hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal, maka simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal .  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya belanja modal selama ini terjadi tidak ditentukan oleh faktor pertumbuhan ekonomi.
2. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya belanja modal selama ini terjadi tidak ditentukan oleh faktor Pendapatan Asli Daerah.
3. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya belanja modal selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor Dana Alokasi Umum.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Penelitian ini menggunakan sampel Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung saja. Dengan begitu daya generalisasi penelitian ini masih rendah. Studi ini dapat diperluas dengan menggunakan sampel di luar Provinsi Lampung.
2. Penggunaan data yang lebih lengkap dengan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makroekonomi.

## 5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini yaitu:

1. Sampel dalam penelitian ini dibatasi pada kabupaten/kota tertentu yang memiliki ketersediaan data, yaitu 11 kabupaten/kota di Propinsi Lampung. Hal ini menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku untuk kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian, sehingga hasilnya belum dapat di generalisasi untuk seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.
2. Penelitian ini tidak memberikan secara rinci alokasi penggunaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum manakah yang memberikan kontribusi besar terhadap anggaran belanja modal.



3. Penelitian ini tidak membahas kebijakan pemerintah dalam penyusunan anggaran Belanja Modal.
4. Pada penelitian ini regresi dilakukan sekaligus 3 tahun, untuk penelitian selanjutnya melakukan teknik analisis dengan cara meregresi pertahun untuk menghindari hasil penelitian yang bias.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Halim Abdul, 2004, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAU) terhadap Belanja Pemerintahan Daerah : Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali* Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI, 16 – 17 Oktober 2003, Surabaya, hal. 1140.
- Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa-Bali)*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Bangun, 2009, *Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dengan Internal control Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang)*, Tesis, Medan :Universitas Sumatera Utara, Terpublikasi
- Boediono, 2010. *Ekonomi Indonesia Mau ke Mana?, Kumpulan Esai ekonomi, Edisi Ketiga*, Jakarta, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Dini Arwati & Novita Hadiati, 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*. Simposium Nasional Akuntansi, November, Semarang.
- Darwanto dan Yustikasari, 2007. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. *Simposium Nasional Akuntansi*, Juli, Makasar.
- Ghozali, Iman, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariasi Dengan Program SPSS*, Edisi 4, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul. 2001. *Analisis Varian Atas Anggaran Pendapatan Asli Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*.

- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat: Jakarta
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah, 2006. *Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nugroho Suratno Putro, 2009, *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (Study kasus pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah)*, Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2002. *Research Methods for Business (A Skill Building Approach)*. Second Edition. John Wiley & Sons. New York.
- Stine, William F. 1994. Is Local Government Revenue Response to Federal Aid Symmetrical? Evidence from Pennsylvania County Government in an Era of Retrenchment. *National Tax Journal*, Vol. 47 No. 4.
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, *tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, *tentang Penerimaan Daerah*.
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan atau Dana Alokasi Umum.
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Von Hagen, Jurgen. 2002. *Fiscal rules ,fiscal institutions, and fiscal performance .The Economic and Social review 33(3): 263-284*.
- Yonia Ivana, 2009. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung*.

Yovita, Farah Marta. 2011. "*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintahan Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010)*". Diponegoro Jurnal Of Accounting. Semarang: UNDIP.

Wertianti, I G A Gede., dan Dwirandra. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Belanja Modal dengan PAD dan DAU sebagai Variabel Moderasi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, ISSN: 2302-8556.

[www.bps.go.id/lampung](http://www.bps.go.id/lampung). Diakses pada 16 Oktober 2015

[www.depkeu.djpk.go.id](http://www.depkeu.djpk.go.id). Diakses pada 16 Oktober 2015